



BAB I

PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 telah dapat disusun. Laporan Keuangan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul untuk tahun anggaran 2025. Dalam pengelolaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Operasional, 4) Laporan Perubahan Ekuitas dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak 1 Januari 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Laporan keuangan kadang kala mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menyusun laporan keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang diperlukan untuk melakukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Catatan atas Laporan Keuangan perlu dibuat dengan menyajikan penjelasan dan informasi atas seluruh akun dan sub akun pada pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai untuk memudahkan pengguna terutama Lembaga Pemeriksa dalam memahami Laporan Keuangan dapat dengan jelas dan tidak multi tafsir. Penyajian



Laporan Keuangan dengan *full disclosure* sehingga akan membantu fungsi konsolidasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul guna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi untuk Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.



d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyampaikan informasi yang transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, yaitu membandingkan realisasi belanja daerah dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengetahui sisa perhitungan tahun anggaran berkenan dan memberikan gambaran posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Organisasi Perangkat Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

B. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu:



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 88);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 57);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran



Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 63).



C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan PD

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Pendapatan
 - 2. Belanja
- B. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 1. Aset
 - 2. Kewajiban
 - 3. Ekuitas
- C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 1. Pendapatan LO
 - 2. Beban
- D. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab V. Penutup



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.
- Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan informasi realisasi anggaran dan belanja OPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- laporan keuangan Neraca, Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan pada tanggal periode akuntansi.
- Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas ekuntansi.
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO koreksi yang langsung menambah ekuitas dan ekuitas akhir.
- Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan.
- Bab V Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada tahun 2025. Target kinerja keuangan tertuang dalam DPA Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 3 Januari 2025. Adapun pencapaian realisasi keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2025 dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan Anggaran Tahun 2025

Uraian	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
BELANJA DAERAH	5.989.664.575,00	5.700.477.079,00	95,17
Belanja Operasi	5.920.124.575,00	5.638.983.079,00	95,25
Belanja Modal	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Transfer			
JUMLAH BELANJA	5.989.664.575,00	5.700.477.079,00	95,17
SURPLUS/(DEFISIT)	(5.989.664.575,00)	(5.700.477.079,00)	95,17

2.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah yang tidak mengelola pendapatan atau penerimaan daerah, oleh karena itu pendapatan disajikan dengan nilai Nol.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

2.1.2 Target dan Realisasi Belanja

Anggaran belanja daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 berdasarkan DPPA-SKPD Nomor DPPA/A.3/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 September 2025 ditetapkan sebesar Rp 5.989.664.575,00 realisasinya sebesar Rp 5.700.477.079,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 289.187.496,00 atau mencapai 95,17%. Adapun rincian belanja dan realisasi belanja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta perbandingan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	LEBIH/ KURANG	% 2025	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH	5.989.664.575,00	5.700.477.079,00	289.187.496,00	95,17	34.394.508.903,00
BELANJA OPERASI	5.920.124.575,00	5.638.983.079,00	281.141.496,00	95,25	34.311.833.903,00
Belanja Pegawai	1.672.018.741,00	1.507.801.290,00	164.217.451,00	90,18	1.525.259.229,00
Belanja Barang dan Jasa	3.070.812.094,00	2.953.888.049,00	116.924.045,00	96,19	2.594.231.506,00
Belanja Hibah	1.177.293.740,00	1.177.293.740,00	0,00	100,00	30.192.343.168,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	5.920.124.575,00	5.638.983.079,00	281.141.496,00	95,25	34.311.833.903,00
BELANJA MODAL	69.540.000,00	61.494.000,00	8.046.000,00	88,43	82.675.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.540.000,00	61.494.000,00	8.046.000,00	88,43	82.675.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	69.540.000,00	61.494.000,00	8.046.000,00	88,43	82.675.000,00
JUMLAH BELANJA	5.989.664.575,00	5.700.477.079,00	289.187.496,00	95,17	34.394.508.903,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Penjelasan dari belanja daerah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi ditetapkan sebesar Rp. 5.920.124.575,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.638.983.079,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 281.141.496,00 atau mencapai 95,25%.

2. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp 69.540.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 61.494.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.046.000,00 atau mencapai 88,43%

Tahun Anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu 7 (tujuh) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan didukung dengan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan target dan realisasi yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kegiatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	97.265.000,00	91.713.104,00	94,29
1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	97.265.000,00	91.713.104,00	94,29
1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	97.265.000,00	91.713.104,00	92,95
2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.151.783.401,00	1.960.881.701,00	91,13
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.201.400,00	92.010.470,00	96,65
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.191.000,00	32.084.500,00	96,67
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.727.400,00	30.050.000,00	97,80
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	360.000,00	327.000,00	90,83
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	790.000,00	152.000,00	19,24



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Uraian		Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	430.000,00	326.500,00	75,93
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.293.000,00	29.015.470,00	99,05
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.000,00	55.000,00	13,41
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.708.038.741,00	1.542.177.790,00	90,29
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.672.018.741,00	1.507.801.290,00	90,18
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.325.000,00	1.325.000,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.695.000,00	33.051.500,00	95,26
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.683.200,00	37.339.610,00	96,53
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38.683.200,00	37.339.610,00	96,53
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.798.060,00	58.290.390,00	94,32
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.215.660,00	4.215.165,00	99,99
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.509.000,00	26.530.971,00	96,44
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.882.600,00	4.882.600,00	100,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.490.800,00	6.487.654,00	99,95
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.190.000,00	99,17
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000,00	14.984.000,00	85,62
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.652.000,00	76.839.477,00	91,86
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.585.000,00	33.056.710,00	98,43
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.192.000,00	38.907.767,00	86,09
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.875.000,00	4.875.000,00	100,00
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.870.000,00	92.729.964,00	97,74
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.300.000,00	65.719.964,00	97,65
2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.710.000,00	12.165.000,00	95,71
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.860.000,00	8.860.000,00	100,00
4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	5.985.000,00	99,75
3 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.306.864.234,00	1.254.498.627,00	95,99
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.306.864.234,00	1.254.498.627,00	95,99
1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	154.185.000,00	150.473.351,00	97,59
2 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1.152.679.234,00	1.104.025.276,00	95,78
4 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.541.630.340,00	1.528.730.150,00	99,16



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.541.630.340,00	1.528.730.150,00	99,16
1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	100.179.600,00	99.958.301,00	99,78
2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.441.450.740,00	1.428.771.849,00	99,12
5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	63.505.000,00	62.443.861,00	98,33
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	63.505.000,00	62.443.861,00	98,33
1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	63.505.000,00	62.443.861,00	98,33
6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	404.913.800,00	401.519.001,00	99,16
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	404.913.800,00	401.519.001,00	99,16



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	404.913.800,00	401.519.001,00	99,16
7 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	423.702.800,00	400.690.635,00	94,57
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	423.702.800,00	400.690.635,00	94,57
1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.245.100,00	1.245.100,00	100,00
2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	47.685.000,00	38.184.727,00	80,08
3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	209.138.000,00	206.426.183,00	98,70



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32.014.900,00	32.014.825,00	100,00
5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	133.619.800,00	122.819.800,00	91,92
JUMLAH	5.989.664.575,00	5.700.477.079,00	95,17

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Target kinerja dan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target. Untuk kegiatan yang tidak mencapai target 90% dari anggaran yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	790.000,00	152.000,00	19,24
	<i>Menyesuaikan Jumlah Dokumen yang digandakan</i>			
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	430.000,00	326.500,00	75,93
	<i>Menyesuaikan Jumlah Dokumen yang digandakan</i>			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.000,00	55.000,00	13,41
	<i>Laporan SPIP sudah tidak menggunakan Dokumen fisik, dan untuk Tahun 2025 tidak ada Evaluasi SOP sehingga tidak membuat Laporan Evaluasi</i>			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000,00	14.984.000,00	85,62
	<i>Menyesuaikan dengan surat permohonan kunjungan tamu</i>			
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43
	<i>Menyesuaikan harga barang dipasaran.</i>			
6	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	47.685.000,00	38.184.727,00	80,08
	<i>FGD Tematik tidak terlaksana karena Bupati Melakukan Cuti dalam rangka Pencalonan diri sebagai Kepala Daerah</i>			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 PENJELASAN POS - POS PENDAPATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bukan merupakan SKPD yang mengelola pendapatan dan penerimaan daerah. Sehingga Anggaran dan realisasi pendapatan pada tahun 2025 adalah Nol.

3.1.2 PENJELASAN POS - POS BELANJA

Belanja Daerah menurut Laporan Realisasi Anggaran (SAP) meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal Rp. 5,989,664,575,00. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 serta realisasi TA 2024, sebagai berikut :

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Operasi	5.920.124.575,00	5.638.983.079,00	95,25	34.311.833.903,00
2. Belanja Modal	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43	82.675.000,00
3. Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	5.989.664.575,00	5.700.477.079,00	95,17	34.394.508.903,00

Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp5.700.477.079,00 atau Rp95,17% dari anggaran sebesar Rp5.989.664.575,00 dan turun sebesar Rp28.694.031.824,00 atau 83,43% dibanding realisasi TA 2024 sebesar Rp34.394.508.903,00 yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1 Belanja Operasi

Rp5.638.983.079,00

Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah Rp. 5.920.124.575,00 dengan anggaran dan realisasi tahun 2025 serta realisasi TA 2024, sebagai berikut :

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Pegawai	1.672.018.741,00	1.507.801.290,00	90,18	1.525.259.229,00
2. Belanja Barang & Jasa	3.070.812.094,00	2.953.888.049,00	96,19	2.594.231.506,00
3. Belanja Hibah	1.177.293.740,00	1.177.293.740,00	100,00	30.192.343.168,00
Jumlah Belanja Operasi	5.920.124.575,00	5.638.983.079,00	95,25	34.311.833.903,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp5.638.983.079,00 atau 95,25% dari anggaran sebesar Rp5.920.124.575,00 dan turun sebesar Rp28.672.850.824,00 atau 83,57% dibanding realisasi TA 2024 sebesar Rp34.311.833.903,00 yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Rp1.507.801.290,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebagai berikut:

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.672.018.741,00	1.507.801.290,00	90,18	1.525.259.229,00
Jumlah Belanja Pegawai	1.672.018.741,00	1.507.801.290,00	90,18	1.525.259.229,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp1.507.801.290,00 atau 90,18% dari anggaran sebesar Rp1.672.018.741,00 dan turun sebesar Rp17.457.939,00 atau 1,14% dibanding realisasi TA 2024 sebesar Rp1.525.259.229,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dibandingkan realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Belanja Gaji Pokok ASN	1.304.441.600,00	1.195.590.886,00	91,66	1.191.840.900,00
2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	107.086.056,00	83.798.385,00	78,25	93.123.162,00
3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	88.550.000,00	79.730.000,00	90,04	80.180.000,00
4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	51.520.000,00	49.680.000,00	96,43	58.880.000,00
5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.840.000,00	31.394.166,00	87,60	29.435.000,00
6) Belanja Tunjangan Beras ASN	66.334.200,00	51.369.920,00	77,44	55.401.300,00
7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.219.314,00	16.220.838,00	89,03	16.384.523,00
8) Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.571,00	17.095,00	62,00	14.344,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.672.018.741,00	1.507.801.290,00	90,18	1.525.259.229,00

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Rp2.953.888.049,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebagai berikut:

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	3.070.812.094,00	2.953.888.049,00	96,19	2.594.231.506,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	3.070.812.094,00	2.953.888.049,00	96,19	2.594.231.506,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp. 2.953.888.049,00 atau 96,19% dari anggaran sebesar Rp. 3.070.812.094,00 dan naik sebesar Rp. 359.656.543,00 atau 13,86% dibanding realisasi TA 2024 sebesar Rp. 2.594.231.506,00 yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Belanja Barang	908.730.194,00	871.518.400,00	95,91	683.359.637,00
b. Belanja Jasa	1.681.412.500,00	1.610.724.931,00	95,80	1.603.916.173,00
c. Belanja Pemeliharaan	92.395.400,00	91.549.050,00	99,08	97.762.479,00
d. Belanja Perjalanan Dinas	388.274.000,00	380.095.668,00	97,89	209.193.217,00
Jumlah	3.070.812.094,00	2.953.888.049,00	96,19	2.594.231.506,00

a. Belanja Barang

Anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 dibandingkan realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	908.730.194,00	871.518.400,00	95,91	683.359.637,00
Jumlah	908.730.194,00	871.518.400,00	95,91	683.359.637,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Belanja Jasa

Anggaran dan realisasi Belanja Jasa TA 2025 dibandingkan realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	1.446.740.000,00	1.403.352.321,00	97,00	1.313.927.255,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.290.000,00	9.658.110,00	93,86	9.524.168,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	211.882.500,00	186.684.500,00	88,11	252.464.750,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	6.030.000,00	80,40	20.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
Jumlah	1.681.412.500,00	1.610.724.931,00	95,80	1.595.916.173,00

c. Belanja Pemeliharaan

Anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dibandingkan realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.535.400,00	80.689.050,00	98,96	95.762.479,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.860.000,00	8.860.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
Jumlah	92.395.400,00	91.549.050,00	99,08	97.762.479,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dibandingkan realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	388.274.000,00	380.095.668,00	97,89	209.193.217,00
Jumlah	388.274.000,00	380.095.668,00	97,89	209.193.217,00

3.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebagai berikut:

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah	1.177.293.740,00	1.177.293.740,00	100,00	30.192.343.168,00
Jumlah Belanja Hibah	1.177.293.740,00	1.177.293.740,00	100,00	30.192.343.168,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp1.177.293.740,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.177.293.740,00 dan turun sebesar Rp29.015.049.428,00 atau 96,10% dibanding realisasi TA 2024 sebesar Rp30.192.343.168,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.177.293.740,00	1.177.293.740,00	100,00	1.137.463.168,00
Jumlah	1.177.293.740,00	1.177.293.740,00	100,00	1.137.463.168,00

Selanjutnya Rincian dari Bantuan Keuangan kepada 8 Partai Politik dari Pagu Anggaran sebesar Rp1.177.293.740,00 sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Lebih/Kurang
	Realisasi	Realisasi	
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	244.041.798,00	258.429.162,00	-14.387.364,00
2. Partai Nasional Demokrat	219.144.688,00	213.328.054,00	5.816.634,00
3. Partai Kebangkitan Bangsa	171.818.878,00	124.133.666,00	47.685.212,00
4. Partai Golongan Karya	156.198.980,00	138.478.636,00	17.720.344,00
5. Partai Gerakan Indonesia Raya	138.604.354,00	120.328.514,00	18.275.840,00
6. Partai Amanat Nasional	114.220.974,00	133.767.356,00	-19.546.382,00
7. Partai Keadilan Sejahtera	100.021.978,00	97.577.793,00	2.444.185,00
8. Partai Demokrat	33.242.000,00	51.419.988,00	-18.177.988,00
Jumlah	1.177.293.650,00	1.137.463.169,00	39.830.481,00

Penyerahan Bantuan keuangan Partai Politik mengalami kenaikan ditahun 2025, menyesuaikan jumlah total perolehan suara hasil pemilu serentak Tahun 2024. Hibah Bantuan Keuangan Partai politik tidak menggunakan NPHD karena sesuai dengan regulasi yaitu Permendagri No 78 Tahun 2020 atas perubahan Permendagri No 36 Tahun 2018 tentang tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

3.1.2.1 Belanja Modal

Rp61.494.000,00

Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul TA 2025 meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan anggaran dan realisasi tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, sebagai berikut :

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43	82.675.000,00
Jumlah Belanja Modal	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43	82.675.000,00

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp. 61.494.000,00 atau 88,43% dari anggaran sebesar Rp. 69.540.000,00 dan turun sebesar Rp. 21.181.000,00 atau 25,62% dibanding realisasi TA 2024 sebesar Rp. 82.675.000,00 yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp61.494.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebagai berikut:

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	12.575.000,00
b. Belanja Modal Komputer	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43	70.100.000,00
Jumlah	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43	82.675.000,00

Pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Komputer TA 2025 sebesar Rp61.494.000,00 atau 88,43% dari anggaran sebesar Rp. 69.540.000,00 yang terdiri sebagai berikut:"

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Belanja Modal Komputer Unit	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43	70.100.000,00
b. Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00
Jumlah Belanja	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43	70.100.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja Modal Komputer Unit TA 2025 sebesar Rp61.494.000,00 atau 88,43% dari anggaran sebesar Rp. 69.540.000,00 yang terdiri sebagai berikut:"

	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Belanja Modal Personal Komputer	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43	70.100.000,00
Jumlah Belanja Modal Komputer	69.540.000,00	61.494.000,00	88,43	70.100.000,00

Belanja Modal Komputer Unit ini menggunakan metode pengadaan e-purchasing melalui sistem Ecatalog yang dilakukan oleh pejabat pengadaan, adapun selisih dari sisa realisasi anggaran dikarenakan harga barang di sistem Ecatalog dibawah standar harga barang dan jasa (SHBJ) Tahun 2025.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut.

3.2.1 ASET LANCAR **Rp1.003.906,00**

Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.003.906,00 turun sebesar Rp9.794,00 atau 0,97% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.013.700,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Persediaan	1.003.906,00	1.013.700,00
Jumlah	1.003.906,00	1.013.700,00

3.2.1.1 Persediaan **Rp1.003.906,00**

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Saldo persediaan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.003.906,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Persediaan per Jenis Barang Tahun 2025

No	Uraian	Saldo akhir 2024 (Rp) Audited	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo akhir 2025 (Rp)
1.	BARANG PAKAI HABIS	1.013.700,00	297.359.595,00	297.369.389,00	1.003.906,00
1.1	BAHAN	0,00	11.959.920,00	11.959.920,00	0,00
1.1.12	Bahan Lainnya		11.959.920,00	11.959.920,00	0,00
1.2	SUKU CADANG	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
1.2.7	Suku Cadang Alat Pertanian		234.000,00	234.000,00	0,00
1.3	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	1.013.700,00	282.953.128,00	282.962.922,00	1.003.906,00
1.3.1	Alat Tulis Kantor	232.000,00	25.415.460,00	25.217.055,00	430.405,00
1.3.2	Kertas Dan Kover	401.000,00	10.644.541,00	10.711.540,00	334.001,00
1.3.6	Bahan Komputer		13.669.832,00	13.669.832,00	0,00
1.3.7	Perabot Kantor	229.000,00	10.129.288,00	10.162.288,00	196.000,00
1.3.8	Alat Listrik	122.200,00	4.215.165,00	4.337.365,00	0,00
1.3.9	Perlengkapan Dinas		195.286.074,00	195.286.074,00	0,00
1.3.12	Suvenir/Cinder Mata		23.176.800,00	23.176.800,00	0,00
1.3.13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.500,00	415.968,00	401.968,00	43.500,00
1.4	OBAT- OBATAN	0,00	2.212.547,00	2.212.547,00	0,00
1.4.1	Obat		2.212.547,00	2.212.547,00	0,00
JUMLAH		1.013.700,00	297.359.595,00	297.369.389,00	1.003.906,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2.2 ASET TETAP

Rp1.505.518.427,19

Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.505.518.427,19 turun sebesar Rp164.499.269,49 atau 9,85% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.670.017.696,68 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Tanah	720.000.000,00	720.000.000,00
2. Peralatan dan Mesin	1.273.474.889,45	1.211.980.889,45
3. Gedung dan Bangunan	755.829.000,00	1.075.790.230,00
4. Jalan, Jaringan, Irigasi	304.000,00	39.988.194,00
5. Aset Tetap Lainnya	183.525.150,00	183.525.150,00
7. Akumulasi Penyusutan	(1.427.614.612,26)	(1.561.266.766,77)
Jumlah	1.505.518.427,19	1.670.017.696,68

Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2025

Aset Tetap	Saldo Audited 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
Tanah	720.000.000,00			720.000.000,00
Peralatan dan Mesin	1.211.980.889,45	61.494.000,00		1.273.474.889,45
Gedung dan Bangunan	1.075.790.230,00	755.829.000,00	1.075.790.230,00	755.829.000,00
Jalan, Jaringan, Irigasi	39.988.194,00			39.988.194,00
Aset Tetap Lainnya	183.525.150,00			183.525.150,00
Sub Jumlah	3.231.284.463,45	817.323.000,00	1.075.790.230,00	2.972.817.233,45
Akumulasi Penyusutan	(1.561.266.766,77)			(1.427.614.612,26)
Jumlah	1.670.017.696,68	817.323.000,00	1.075.790.230,00	1.545.202.621,19

3.2.2.1 Tanah

Rp720.000.000,00

Nilai Aset Tanah per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp720.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap	Saldo Audited 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
Tanah	720.000.000,00	-	-	720.000.000,00
Tanah Persil	720.000.000,00	-	-	720.000.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	720.000.000,00			720.000.000,00

3.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Rp1.273.474.889,45

Nilai Aset Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.273.474.889,45 dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Tahun 2025	Saldo Audited Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan
Alat Angkutan	548.125.351,56	548.125.351,56	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	347.554.023,00	347.554.023,00	-
Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar	54.889.054,00	54.889.054,00	-
Alat Laboratorium	784.000,00	784.000,00	-
Komputer	322.122.460,89	260.628.460,89	61.494.000,00
Jumlah	1.273.474.889,45	1.211.980.889,45	61.494.000,00

3.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Rp755.829.000,00

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp755.829.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	Saldo Tahun 2025	Saldo Audited Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan
Bangunan Gedung	755.829.000,00	1.064.695.230,00	(308.866.230,00)
Jumlah	755.829.000,00	1.064.695.230,00	(308.866.230,00)

Pada Tahun 2025 terdapat usulan penghapusan Bangunan Gedung kantor sebesar Rp1.064.695.230,00 yang direklasifikasi kedalam Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah yang merupakan Bangunan Gedung Kantor lama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Jl. Brigjen Katamso No.10, Trimulyo I, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dan pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul mendapatkan mutasi Bangunan Gedung Kantor dari Badan Keuangan Aset Daerah sebesar Rp755.829.000,00 yang beralamatkan di Komplek Bangsal Sewokoprojo, Komplek Jalan Pangarasan, Purbosari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

3.2.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi **Rp304.000,00**

Nilai Aset Jalan, Jaringan, Irigasi per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp304.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Tahun 2025	Saldo Audited Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan
Bangunan Air	-	19.871.000,00	(19.871.000,00)
Jaringan	304.000,00	20.117.194,00	(19.813.194,00)
Jumlah	304.000,00	39.988.194,00	(39.684.194,00)

Penurunan dari Saldo Aset Bangunan Air, dikarenakan terdapat usulan penghapusan Bangunan Air sebesar Rp19.871.000,00 yang pada tahun 2025 ini direklasifikasi kedalam Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah, dan merupakan Bangunan Air lama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Jl. Brigjen Katamso No.10, Trimulyo I, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya untuk penurunan saldo pada Aset jaringan sebesar Rp19.813.194,00 merupakan reklasifikasi dari dari Jaringan Distribusi ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah yang merupakan dampak dari usulan penghapusan Aset Jaringan Distribusi di Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Jl. Brigjen Katamso No.10, Trimulyo I, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

3.2.2.5 Aset Tetap Lainnya **Rp183.525.150,00**

Nilai Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp183.525.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Tahun 2025	Saldo Audited Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan
Bahan Perpustakaan	435.000,00	435.000,00	-
Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/Olahraga	183.090.150,00	183.090.150,00	-
Jumlah	183.525.150,00	183.525.150,00	-

Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan dalam Aset tetap lainnya.

3.2.2.6 Akumulasi Penyusutan **(Rp1.427.614.612)**

Nilai Akumulasi Penyusutan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar-Rp1.427.614.612,26 dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Tahun 2025	Saldo Audited Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.155.348.972,10)	(1.116.079.204,32)	(39.269.767,78)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(272.098.440,00)	(425.738.096,70)	153.639.656,70
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(167.200,16)	(19.449.465,75)	19.282.265,59
Jumlah	(1.427.614.612,26)	(1.561.266.766,77)	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Saldo Akumulasi Penyusutan pada tahun 2025 sebesar (Rp1.427.614.612,26) mengalami penurunan sebesar Rp133.652.154,51 dari saldo awal sebesar (Rp1.561.266.766,77) yang disebabkan oleh kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp39.269.767,78, dan penurunan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan serta Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi akibat mutasi dari Aset tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp172.921.922,29.

3.2.3 ASET LAINNYA **Rp643.125.915,47**

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp643.125.915,47 yang merupakan kenaikan, karna Jumlah Aset Lainnya di tahun 2024 Rp0,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Aset Lain-Lain	1.128.465.401,00	12.990.977,00
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(485.339.485,53)	(12.990.977,00)
Jumlah	643.125.915,47	-

Daftar Mutasi Aset Lainnya Tahun 2025

Aset Lainnya	Saldo Audited 2024	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025 (Rp)
Aset Lain-Lain	12.990.977	1.115.474.424		1.128.465.401
Sub Jumlah	12.990.977	1.115.474.424	-	1.128.465.401
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(12.990.977)	(472.348.509)		(485.339.486)
Jumlah	-	643.125.915	-	643.125.915

3.2.3.1 Aset Lain-Lain **Rp1.128.465.401,00**

Nilai Aset Lain-Lain per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.128.465.401,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Tahun 2025	Saldo Audited Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan
Aset Rusak Berat/Usang	12.990.977,00	12.990.977,00	-
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.115.474.424,00	-	1.115.474.424,00
Jumlah	1.128.465.401,00	12.990.977,00	1.115.474.424,00

Kenaikan pada Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp1.115.474.24,00 merupakan Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja senilai Rp1.064.695.230,00, Tugu/Tanda Batas Administrasi senilai Rp11.095.000,00, Bangunan Pembuang Pengaman Sungai senilai Rp19.871.000,00 dan Jaringan Distribusi Rp19.813.194,00 yang berada di Gedung lama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Jl. Brigjen Katamso No.10, Trimulyo I, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten yang di Tahun 2025 ini dalam pengusulan penghapusan.

3.2.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya **(Rp485.339.485,53)**

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 sebesar -Rp485.339.485,53 dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Tahun 2025	Saldo Audited Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(12.990.977,00)	(12.990.977,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam	(472.348.508,53)		(472.348.508,53)
Jumlah	(485.339.485,53)	(12.990.977,00)	(472.348.508,53)

Kenaikan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar (Rp472.348.508,53) merupakan Reklasifikasi dari Akumulasi penyusutan Aset Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang Tahun 2025 diusulkan untuk penghapusan Aset.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2.4 KEWAJIBAN **Rp3.443.444,00**
Kewajiban per 31 Desember 2025 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp3.443.444,00 turun sebesar Rp460.320,00 atau 11,79% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.903.764,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2. Utang Belanja	3.443.444,00	3.903.764,00
Jumlah	3.443.444,00	3.903.764,00

3.2.5.1 Utang Belanja **Rp3.443.444,00**
Utang Belanja per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.443.444,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Tahun 2025	Saldo Audited Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan
1 Utang Belanja Jasa	3.443.444,00	3.903.764,00	(460.320,00)
Jumlah	3.443.444,00	3.903.764,00	(460.320,00)

Utang Belanja Jasa ini terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon, Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air dan Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik adapun rincian Utang Belanja Jasa adalah sebagai berikut :

	Saldo Tahun 2025	Saldo Audited Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan
1 Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	25.366,00	48.232,00	(22.866,00)
2 Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	190.770,00	93.770,00	97.000,00
3 Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.227.308,00	3.761.762,00	(534.454,00)
Jumlah	3.443.444,00	3.903.764,00	(460.320,00)

3.2.5 EKUITAS **Rp2.146.204.804,66**
Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.146.204.804,66 naik sebesar Rp479.077.171,98 atau 28,74% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.667.127.632,68 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Ekuitas Awal	1.667.127.632,68	1.622.085.812,37
2. Surplus / (Defisit) LO	(5.707.649.897,02)	(34.349.467.082,69)
3. RK PPKD	6.186.727.069,00	34.394.508.903,00
Jumlah	2.146.204.804,66	1.667.127.632,68

Jumlah ekuitas mutasi per 31 Desember 2025 Rp2.146.204.804,66 berasal dari mutasi aset yang masuk diakui menambah ekuitas dan mutasi keluar diakui mengurangi ekuitas.

ASET EKSTRAKOMTABEL

Aset Ekstrakomtabel merupakan aset tetap yang nilai perolehan per unitnya dibawah nilai kapitalisasi.

Nilai Aset Ekstrakomtabel per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.289.047,62 naik sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.289.047,62 dengan rincian sebagai berikut.

Daftar Mutasi Aset Ekstrakomtabel Tahun 2025

Aset Tetap	Saldo Audited 2024	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	28.792.247,62			28.792.247,62
Gedung dan Bangunan	300.000,00		300.000,00	0,00
Aset Lainnya	196.800,00	300.000,00		496.800,00
Jumlah	29.289.047,62	300.000,00	300.000,00	29.289.047,62

Terdapat Mutasi tambah pada Aset Lainnya yang merupakan mutasi kurang dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp300.000,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

3.3.1 PENDAPATAN-LO **Rp0,00**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan SKPD yang tidak mengelola pendapatan oleh karena itu pendapatan disajikan dengan nilai Rp0,00

3.3.2 BEBAN **Rp5.707.649.897,02**

Beban diakui saat terjadinya kewajiban, beban timbul saat terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.707.649.897,02 turun sebesar Rp28.641.817.185,67 atau 83,38% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.349.467.082,69 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Beban Operasi	5.638.532.553,00	34.312.769.294,00
2. Beban Penyusutan dan Amortisasi	69.117.344,02	36.697.788,69
Jumlah	5.707.649.897,02	34.349.467.082,69

3.3.2.1 Beban Operasi-LO **Rp5.638.532.553,00**

Beban Operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.638.532.553,00 turun sebesar Rp28.674.236.741,00 atau 83,57% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.312.769.294,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Beban Pegawai	1.507.801.290,00	1.525.259.229,00
2. Beban Barang dan Jasa	2.953.437.523,00	2.595.166.897,00
4. Beban Hibah	1.177.293.740,00	30.192.343.168,00
Jumlah	5.638.532.553,00	34.312.769.294,00

3.3.2.1.1 Beban Pegawai **Rp1.507.801.290,00**

Beban Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.507.801.290,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.507.801.290,00	1.525.259.229,00
	1.507.801.290,00	1.525.259.229,00

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN **Rp1.507.801.290,00**

Beban Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.507.801.290,00 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Gaji Pokok ASN	1.195.590.886,00	1.191.840.900,00
b) Beban Tunjangan Keluarga ASN	83.798.385,00	93.123.162,00
c) Beban Tunjangan Jabatan ASN	79.730.000,00	80.180.000,00
d) Beban Tunjangan Fungsional ASN	49.680.000,00	58.880.000,00
e) Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.394.166,00	29.435.000,00
f) Beban Tunjangan Beras ASN	51.369.920,00	55.401.300,00
g) Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.220.838,00	16.384.523,00
h) Beban Pembulatan Gaji ASN	17.095,00	14.344,00
	1.507.801.290,00	1.525.259.229,00

Beban (LO)	Belanja (LRA)	Selisih	Keterangan
1.507.801.290,00	1.507.801.290	0	

3.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa **Rp2.953.437.523,00**

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.953.437.523,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Beban Barang	297.369.389,00	249.220.660,00
b. Beban Jasa	2.181.205.402,00	2.034.065.541,00
c. Beban Pemeliharaan	94.767.064,00	102.687.479,00
d. Beban Perjalanan Dinas	380.095.668,00	209.193.217,00
	2.953.437.523,00	2.595.166.897,00

a. Beban Barang **Rp297.369.389,00**

Beban Barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp297.369.389,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Barang Pakai Habis	297.369.389,00	249.220.660,00
	297.369.389,00	249.220.660,00

Rincian Beban Barang Pakai Habis			
No	Rincian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	26.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Lainnya	11.959.920,00	362.500,00
3	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	234.000,00	416.000,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.217.055,00	23.758.640,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.711.540,00	9.235.000,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.669.832,00	14.790.000,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.162.288,00	12.271.800,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.337.365,00	8.516.200,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	195.286.074,00	165.851.820,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	23.176.800,00	7.500.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	401.968,00	416.000,00
12	Beban Obat-Obatan-Obat	2.212.547,00	6.076.700,00
	Jumlah	297.369.389,00	249.220.660,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Terdapat selisih antara Beban Barang Pakai Habis dengan Belanja Barang Pakai Habis LRA yang di jelaskan dalam tabel berikut :

Beban (LO)	Belanja (LRA)	Selisih	Keterangan
297.369.389,00	871.518.400	(574.149.011,00)	Merupakan reklasifikasi dari Beban Barang Habis Pakai yang direklasifikasi ke Beban Jasa dan Beban Pemeliharaan.

Penjelasan selisih

1. Pengakuan Persediaan

Selisih Pengakuan Persediaan Tahun 2024 dan 2025 Rp 9.794,00

2. Reklasifikasi Belanja Pakai habis ke Belanja Jasa

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp (509.406.791,00)

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp (61.534.000,00)
(570.940.791,00)

3. Reklasifikasi Belanja Pakai habis ke Belanja Pemeliharaan

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp (3.218.014,00)

Rp - 574.149.011,00

b. Beban Jasa

Rp2.181.205.402,00

Beban Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.181.205.402,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Jasa Kantor	1.973.832.792,00	1.744.076.623,00
b) Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.658.110,00	9.524.168,00
c) Beban Sewa Peralatan dan Mesin	186.684.500,00	252.464.750,00
d) Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.030.000,00	20.000.000,00
e) Beban Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	8.000.000,00
	2.181.205.402,00	2.034.065.541,00

a) Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.973.832.792,00 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Jasa Kantor			
No	Rincian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	145.320.000,00	69.800.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	839.125.000,00	781.125.000,00
3	Beban Honorarium Rohaniwan	1.000.000,00	500.000,00
4	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	51.500.000,00	49.500.000,00
5	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	32.402.000,00	31.500.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	950.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	53.900.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Administrasi	149.615.000,00	210.137.500,00
9	Beban Jasa Tenaga Ahli	0,00	1.500.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

10	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.100.000,00	1.985.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000,00	5.200.000,00
12	Beban Jasa Tata Rias	37.800.000,00	21.750.000,00
13	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	58.497.500,00	27.500,00
14	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	29.335.054,00	25.225.500,00
15	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	575.940.791,00	443.321.777,00
16	Beban Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	600.000,00
17	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.000.000,00	5.000.000,00
18	Beban Tagihan Telepon	304.392,00	301.892,00
19	Beban Tagihan Air	3.566.280,00	2.474.010,00
20	Beban Tagihan Listrik	34.576.775,00	37.328.444,00
21	Beban Langganan Jurnal/SuratKabar/Majalah	1.190.000,00	1.080.000,00
22	Beban Lembur	960.000,00	870.000,00
Jumlah		1.973.832.792,00	1.744.076.623,00

Terdapat selisih antara beban jasa kantor dengan belanja jasa kantor LRA yang di jelaskan dalam tabel berikut :

Beban (LO)	Belanja (LRA)	Selisih	Keterangan
1.973.832.792,00	1.403.352.321	570.480.471	Jasa Kantor dengan Belanja Jasa Kantor, dikarenakan adanya reklasifikasi Beban Barang habis pakai ke Beban Jasa Kantor.

Penjelasan selisih

1. Belanja barang pakai habis yang di reklas ke beban jasa dengan rincian :

Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp	509.406.791,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp	61.534.000,00
	Rp	570.940.791,00

2. Reklas belanja pakai habis ke beban barang dan jasa

Selisih Pengakuan Utang Tahun 2024 dan 2025	Rp	(460.320,00)
		570.480.471,00

- b) Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban Iuran Jaminan/Asuransi per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.658.110,00 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi			
No	Rincian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.658.110,00	9.524.168,00
Jumlah		9.658.110,00	9.524.168,00

- c) Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp186.684.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin			
No	Rincian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Sewa Electric Generating Set	0,00	10.500.000,00
2	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	92.302.000,00	151.736.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	4.500.000,00
4	Beban Sewa Mebel	62.170.000,00	67.728.750,00
5	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.212.500,00	4.500.000,00
6	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	7.200.000,00	7.500.000,00
7	Beban Sewa System/Power Supply	0,00	6.000.000,00
8	Beban Sewa Peralatan Personal Computer	10.800.000,00	0,00
Jumlah		186.684.500,00	252.464.750,00

d) Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.030.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan			
No	Rincian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	900.000,00	11.000.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.130.000,00	9.000.000,00
Jumlah		6.030.000,00	20.000.000,00

e) Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya			
No	Rincian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Sewa Alat Musik	5.000.000,00	8.000.000,00
Jumlah		5.000.000,00	8.000.000,00

c. Beban Pemeliharaan

Rp94.767.064,00

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp94.767.064,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83.907.064,00	95.762.479,00
b) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.860.000,00	4.925.000,00
c) Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00
	94.767.064,00	102.687.479,00

Terdapat selisih antara beban Pemeliharaan dengan belanja Pemeliharaan di LRA yang di jelaskan dalam tabel berikut :

Beban (LO)	Belanja (LRA)	Selisih	Keterangan
------------	---------------	---------	------------



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

94.767.064,00	91.549.050	3.218.014	Selisih sebesar Rp3.218.014,00 merupakan reklasifikasi tambah dari Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ke Beban Pemeliharaan.
---------------	------------	-----------	---

a) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp83.907.064,00

Rincian Beban Jasa Kantor			
No	Rincian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	57.321.064,00	63.376.979,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.796.000,00	10.785.500,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	300.000,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.985.000,00	12.300.000,00
5	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.575.000,00	6.900.000,00
6	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.930.000,00	2.100.000,00
Jumlah		83.907.064,00	95.762.479,00

b) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.860.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
No	Rincian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.860.000,00	4.925.000,00
Jumlah		8.860.000,00	4.925.000,00

c) Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
No	Rincian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	2.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah		2.000.000,00	2.000.000,00

d. Beban Perjalanan Dinas

Rp380.095.668,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Beban Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 sebesar Rp380.095.668,00 dengan rincian sebagai

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	380.095.668,00	209.193.217,00
	380.095.668,00	209.193.217,00

a) Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp380.095.668,00 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
No	Rincian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	45.305.668,00	51.273.217,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	231.300.000,00	157.920.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	103.490.000,00	0,00
	Jumlah	380.095.668,00	209.193.217,00

3.3.2.1.3 Beban Hibah

Rp1.177.293.740,00

Beban Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.177.293.740,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)
a. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.177.293.740,00
	1.177.293.740,00

a. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Rp1.177.293.740,00

Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.177.293.740,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)
a) Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.177.293.740,00
	1.177.293.740,00

Beban (LO)	Belanja (LRA)	Selisih	Keterangan
1.177.293.740,00	1.177.293.740	0	

3.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp69.117.344,02

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp69.117.344,02 naik sebesar Rp32.419.555,33 atau 88,34% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.697.788,69 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.269.767,78	9.369.642,45
b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.162.117,57	24.856.916,76
c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	1.857.222,12	2.471.229,48
d. Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.828.236,55	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah

69.117.344,02

36.697.788,69

3.3.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp39.269.767,78

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.269.767,78 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.713.143,02	4.713.142,80
b. Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.790.999,64	2.485.582,90
c. Beban Penyusutan Alat Laboratorium	98.000,04	98.000,04
d. Beban Penyusutan Komputer	29.667.625,08	2.072.916,71
	39.269.767,78	9.369.642,45

a. Beban Penyusutan Alat Angkutan Rp4.713.143,02

Beban Penyusutan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.713.143,02 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.713.143,02	4.713.143,80
	4.713.143,02	4.713.143,80

b. Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp4.790.999,64

Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.790.999,64 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	2.275.999,56	2.275.999,56
b) Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.515.000,08	209.583,34
	4.790.999,64	2.485.582,90

c. Beban Penyusutan Alat Laboratorium Rp98.000,04

Beban Penyusutan Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 sebesar Rp98.000,04 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	98.000,04	98.000,04
	98.000,04	98.000,04

d. Beban Penyusutan Komputer Rp29.667.625,08

Beban Penyusutan Komputer per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.667.625,08 dengan rincian sebagai berikut.

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
--------------------------	--------------------------



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	24.880.125,00	1.112.500,00
b) Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.787.500,08	960.416,71
	29.667.625,08	2.072.916,71

3.3.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan **Rp21.162.117,57**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.162.117,57 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Beban Penyusutan Bangunan Gedung	20.995.692,54	24.635.016,72
b. Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	166.425,03	221.900,04
	21.162.117,57	24.856.916,76

a. Beban Penyusutan Bangunan Gedung **Rp20.995.692,54**

Beban Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.995.692,54 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.995.692,54	24.635.016,72
	20.995.692,54	24.635.016,72

b. Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti **Rp20.995.692,54**

Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2025 sebesar Rp166.425,03 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Tugu/Tanda Batas-Administrasi	166.425,03	221.900,04
	166.425,03	221.900,04

3.3.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi **Rp1.857.222,12**

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.857.222,12 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Beban Penyusutan Bangunan Air	1.490.325,03	1.987.100,04
b. Beban Penyusutan Jaringan	366.897,09	0,00
	1.857.222,12	1.987.100,04

a. Beban Penyusutan Bangunan Air **Rp1.490.325,03**

Beban Penyusutan Bangunan Air per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.490.325,03 dengan rincian sebagai berikut.

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
----------------------------------	----------------------------------



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.490.325,03	1.987.100,04
---	--------------	--------------

1.490.325,03	1.987.100,04
---------------------	---------------------

b. Beban Penyusutan Jaringan Rp366.897,09

Beban Penyusutan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp366.897,09 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	351.697,05	468.929,40
b) Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah	15.200,04	15.200,04
	366.897,09	484.129,44

3.3.2.2.4 Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp6.828.236,55

Beban Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.828.236,55 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.828.236,55	0,00
	6.828.236,55	0,00

a. Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp6.828.236,55

Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.828.236,55 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	6.828.236,55	0,00
	6.828.236,55	0,00

Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Rp6.828.236,55 merupakan reklasifikasi beban penyusutan dari Gedung Bangunan Kantor yang sedang dalam usulan penghapusan Aset.

3.3.3 SUPLUS/DEFISIT DARI OPERASI Rp5.707.649.897,02

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan. Bila pendapatan lebih besar daripada beban, terjadi kondisi surplus, dan bila sebaliknya terjadi kondisi defisit.

Surplus/Defisit dari Operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.707.649.897,02 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.349.467.082,69 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Beban	5.707.649.897,02	34.349.467.082,69
Defisit	5.707.649.897,02	34.349.467.082,69



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.4.1 EKUITAS

Rp2.146.204.804,66

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.146.204.804,66 naik sebesar Rp479.077.171,98 atau 28,74% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.667.127.632,68 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Ekuitas Awal	1.667.127.633	1.622.085.812
2. (Defisit) LO	(5.707.649.897)	(34.349.467.083)
3. RK PPKD	6.186.727.069	34.394.508.903
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kel	-	-
Ekuitas Akhir	2.146.204.804,66	1.667.127.632,68

3.4.1.1 Ekuitas Awal

Rp1.667.127.632,68

Ekuitas awal merupakan kekayaan bersih pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 1 Januari 2025, yang merupakan selisih Antara Aset dan Kewajiban terinci sebagai berikut :

	Saldo Awal
Aset	1.671.031.396,68
Kewajiban	3.903.764,00
Ekuitas Awal	1.667.127.632,68

3.4.1.2 Surplus Defisit LO

Rp5.707.649.897,02

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan. Bila pendapatan lebih besar daripada beban, terjadi kondisi surplus, dan bila sebaliknya terjadi kondisi defisit. Surplus/ Defisit LO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terinci sebagai berikut :

Pendapatan	0,00
Beban	5.707.649.897,02
Surplus	5.707.649.897,02

3.4.1.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Rp0,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan penyesuaian Ekuitas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025.

Pada Tahun 2025 tidak terdapat Dampak kumulatif perubahan mendasar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul adalah struktur kelembagaan yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,



- fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 8. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 12. pengelolaan UPT.

Dalam hal pengelolaan aset, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350). Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan aset dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan optimalisasi dari aset yang ada untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam hal pengelolaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul

B. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kepala	: Johan Eko Sudarto, S.Sos.MH
Sekretaris	: Nurudin Araniri, S.Pt.,M.E
Kepala Sub Bagian Umum	: Sulastri, S.Sos.
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	: Lilia Kartini Sugito, A.Md
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	: Nani Asyfhah, S.Sos,M.Si
Subkoordinator/Fungsional Muda Bina Ideologi	: Liliestiani, S.Sos
Subkoordinator/Fungsional Muda Kewaspadaan Dini	: Citra Cahyaningrum, S.M
Subkoordinator/Fungsional Muda Penanganan Konflik	: Basirahayu, S.IP.MAP
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan	: Sumarto, S.Pd.,M.M
Subkoordinator/Fungsional Muda Politik Dalam Negeri	: Widodo, S.H.
Subkoordinator/Fungsional Muda Organisasi Kemasyarakatan	: -



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan capaian realisasi pelaksanaan program kegiatan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Laporan ini telah disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan keuangan juga telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Laporan Keuangan ini telah berusaha menyajikan informasi secara memadai dan lengkap (*full disclosure*) yaitu pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan dan informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara sukarela menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini menyajikan mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas posisi per 31 Desember 2025 dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta lampiran yang diperlukan sebagai penjelasan yang lebih rinci, kesemuanya merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain.

Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD bagi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Harapannya Laporan Keuangan ini dapat dijadikan sumber informasi yang sangat relevan bagi pengambilan keputusan dan berguna bagi Lembaga Pemeriksaaan dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Gunungkidul, 31 Desember 2025
PENGUNA ANGGARAN

JOHAN EKO SLDARTO, S.Sos., M.H
NIP. 19710912 199101 1 001



BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan capaian realisasi pelaksanaan program kegiatan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Laporan ini telah disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan keuangan juga telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Laporan Keuangan ini telah berusaha menyajikan informasi secara memadai dan lengkap (*full disclosure*) yaitu pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan dan informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara sukarela menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini menyajikan mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas posisi per 31 Desember 2025 dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta lampiran yang diperlukan sebagai penjelasan yang lebih rinci, kesemuanya merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain.

Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD bagi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Harapannya Laporan Keuangan ini dapat dijadikan sumber informasi yang sangat relevan bagi pengambilan keputusan dan berguna bagi Lembaga Pemeriksaaan dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Gunungkidul, 31 Desember 2025

PENGUNA ANGGARAN

JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos., M.H

NIP. 19710912 199101 1 001